BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan dalam penelitian ini berkaitan dengan sebab krisis ekonomi Amerika Serikat dan dampaknya terhadap perkonomian global secara umum. Selanjutnya upaya upaya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam merespon krisis tersebut. Di bagian ini juga akan dipaparkan interaksi perdagangan Amerika Serikat Indonesia secara umum, lalu selanjutnya berfokus pada dampak krisis tersebut terhadap Industri manufaktur Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan dipaparkan pada bagian akhir, sebagai langkah kunci dalam mengantisipasi krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia secara umum, dan industri manufaktur secara khusus.

4.1 Terjadinya Krisis Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2008

4.1.1 Sebab Krisis

Krisis keuangan (ekonomi) yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008, bermula dari krisis yang terjadi di sektor perumahan, tepatnya apa yang dikenal dengan nama *Subprime Mortgage.* Tapi bagaimana wujud *Subprime Mortgage* ini akan dijelaskan selanjutnya. Sektor perumahan, meskipun berwujud riil, tetap dimasukan dalam investasi keuangan yang non riil, sebab aktivitas tersebut pada dasarnya aktivitas transfer sejumlah likuiditas oleh seorang agen ekonomi kepada agen ekonomi lain, dengan bermacam-macam produk atau instrumen yang diciptakan. Hegemoni finansial/keuangan atau hegemoni sektor

non riil terhadap sektor riil sangat cepat berkembang akibat dari globalisasi pasar finansial atau keuangan, deregulasi pasar domestik dan inovasi produk-produk finansial atau keuangan pada level perusahaan.

Hegemoni ini membuat sektor riil timpang. Ada bom waktu yang tersimpan dalam gerak pertumbuhan pesat sektor non riil atas sektor riil, bom waktu yang siap menghancurkan ekonomi secara keseluruhan, bahkan mengguncang sektor riil itu sendiri yang menjadi tulang punggung berjuta-juta pekerja di suatu negara. Gempa yang dialami oleh sektor riil belum tentu mengguncang ekonomi secara keseluruhan, tetapi gempa yang terjadi pada sektor non riil, dipastikan sepenuhnya berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.

Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi pada kedua pasar keuangan di atas, yaitu di pasar modal dan pasar valas (*money market*) sehingga ekonomi dunia terjangkit penyakit yang bernama ekonomi balon (*bubble economy*), yaitu sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor riil, bahkan sektor riil tersebut amat jauh ketinggalan berkembang (Arafat, 2009 : 2).

Tanda-tanda permasalahan dalam sektor perumahan sebetulnya sudah muncul sejak triwulan terakhir 2006. Saat bisnis perumahan mulai *booming* pada tahun 2001, banyak warga AS berkantong tipis yang membeli rumah murah melalui skema *Subprime Mortgage*. Pada tahun 2006, koreksi pasar mulai menyentuh gelembung bisnis perumahan dan membuat lebih dari 2,5 juta warga AS yang membeli rumah melalui skema tadi tak mampu membayar cicilan. Harga rumah yang mereka kredit melambung tinggi, bahkan ada yang sampai 100% dari

nilai awalnya. Akibatnya, menurut laporan perusahaan penyedia data penyitaan rumah di AS, *Realty Trac*, 2,5 juta rumah dinyatakan disita karena gagal bayar. Ini adalah jumlah penyitaan terbanyak selama 37 tahun. Penyitaan besar-besaran ini jelas bisa menimbulkan banyak warga AS menjadi tuna wisma mendadak, dan bisa menjadi masalah sosial baru (Arafat, 2009 : 33).

Sebelumnya, perlu dilihat sekilas sejarah perkreditan rumah di Amerika Serikat. Sejak tahun 1925, di AS sudah ada undang-undang yang mengatur tentang *mortage*, yaitu peraturan yang terkait dengan sektor perumahan dan kredit pemilikan rumah. Semua warga AS diberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas kredit pemilikan rumah dengan syarat-syarat tertentu yang mudah. Misalnya, jika pendapatan seseorang sudah mencapai jumlah Rp 100 juta setahun, dia bisa mengambil *mortgage* untuk membeli rumah seharga Rp 250 juta. Cicilannya rendah sebab *mortgage* berjangka 30 tahun dengan bunga 6% setahun.

Kemudahan pemberian kredit terjadi seiring harga properti di AS yang sedang naik. Kegairahan pertumbuhan di pasar properti membuat spekulan bermain, spekulasi ikut meningkat. Hal ini membuat banyak orang membeli rumah dan berharap bisa menjual dalam tiga tahun mendatang sebelum suku bunga kredit di naikan, sebab para penyedia kredit properti memberikan suku bunga tetap selama tiga tahun. Orang-orang yang menerima fasilitas kredit kebanyakan adalah orang yang tidak layak mendapatkan faslitas tersebut, orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyelesaikan tanggungan kredit, atau orang dengan latar belakang *NINJA* (*non-income, non-job, non-activity*) (Novianti, 2010 : 2).

Pada tahun 1980, pemerintah federal membuat keputusan yang disebut "deregulasi lembaga penyimpanan uang dan kontrol moneter" (*Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act*). Intinya dalam hal kredit rumah, perusahaan real-estate diperbolehkan menggunakan variabel bunga. Maksudnya, boleh mengenakan bunga tambahan dari bunga yang sudah ditetapkan secara pasti oleh Bank Sentral Amerika Serikat (*The Federal Reserve*). Dengan keluarnya keputusan itu pada 1980 itu bisnis yang yang terkait dengan perumahan kembali bergairah. Bank umum/komersial mendapat bunga tambahan, termasuk para broker dan bisnis-bisnis lain.

Kemudian, pada tahun 1982 pemerintah Amerika Serikat memberlakukan peraturan mengenai transaksi kredit perumahan AMTPA (*The Alternative Mortgage Transaction Parity Act*) yang memperbolehkan penggunaan suku bunga variatif dan pembebanan biaya tinggi. Tetapi kondisi ini tak terlalu mulus. Hambatan muncul karena banyak yang telah mempunyai rumah. Pemerintah mencari jalan keluar dengan membuat skema baru pada tahun 1986, enam tahun kemudian setelah "Deregulasi Kontrol Moneter". Salah satu isinya adalah reformasi pajak, dengan memberi keringanan pajak pembeli rumah. Keringanan ini diberlakukan untuk pembelian rumah berikutnya. Artinya, seseorang boleh membeli dua rumah dalam satu fasilitas *mortage* (Arafat, 2009 : 29).

Memasuki akhir periode 90-an, tingkat suku bunga di Amerika Serikat mengalami *trend* penurunan, diakibatkan besarnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Tekanan bagi *The Fed* untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga Amerika Serikat tidak hanya datang dari luar negeri, namun juga didukung

oleh perubahan pasar pada masa itu. Pada tahun 2001- 2005 Industri dotcom (saham-saham teknologi) yang sejak tahun 1995 mengalami *booming*, kolaps dan menyebabkan banyak perusahaan jenis ini tak mampu membayar pinjaman ke bank. Untuk menyelamatkan mereka *The Fed* menurunkan suku bunga, sehingga suku bunga menjadi rendah.

Suku bunga yang rendah dimanfaatkan pengembang dan perusahaan pembiayaan perumahan untuk membangun perumahan murah dan menjualnya melalui skema *Subprime Mortgage*. Gelembung perumahan ini terjadi di banyak negara bagian, seperti California, Florida, New York, dan banyak negara bagian di barat daya. Penurunan tingkat suku bunga Amerika Serikat pun mendorong popularitas fasilitas kredit *subprime* yang dimanfaatkan oleh para peminjam untuk melakukan perbaikan rumah, *refinance* kredit yang sudah mereka miliki ataupun untuk mengkonsolidasikan hutang-hutang yang lain (Arafat, 2009 : 30).

Terdapat beberapa moda fasilitas kredit pemilikan rumah di Amerika yang berbeda tingkat aksesibiltasnya, yaitu *Subprime Mortage, Prime Mortage, dam Alt-A*. Perbedaan fundamenal antara *Subprime Mortgage* dengan *Prime Mortgage* dan *Alt-A* terletak pada profil risiko peminjamnya. *Subprime Mortage* adalah jenis kredit perumahan yang ditawarkan kepada para individu yang dinilai memiliki risiko tinggi oleh lembaga penyedia kredit perumahan. Kriteria yang biasanya digunakan para lembaga peminjam untuk mengindentifikasi profil risiko seseorang adalah sebagai berikut: prilaku pembayaran sewa properti atau sejarah pembayaran kredit kepemilikan rumah sebelumnya; pernah atau tidak menyatakan berada dalam keadaan bangkrut; rasio hutang tertunggak terhadap penghasilan

individu; dan berkas-berkas yang diserahkan oleh calon peminjam untuk menferivikasi pendapatan si calon peminjam (Arafat, 2009 : 27).

Lembaga penyedia kredit perumahan akan mengenakan tarif kredit *Prime Mortgage* kepada para calon peminjam dengan profil risiko rendah, dengan bunga dan biaya administrasi yang rendah apabila dibandingkan dengan bunga dan biaya administrasi yang dikenakan pada peminjam *Subprime Mortgage*. *Alt-A mortgage* pada umumnya diberikan kepada individu yang memiliki rating kredit cukup baik, namun tidak dapat memberikan dokumentasi yang disyaratkan untuk mendapatkan pinjaman *Prime Mortgage* atau individu dengan sejarah kredit yang baik, namun memiliki rasio hutang terhadap pendapatan yang terlalu tinggi untuk dapat diklasifikasikan ke dalam peminjam *Prime Mortgage*. Bunga yang dikenakan kepada peminjam sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh produk *Prime Mortgage* (Arafat, 2009 : 28).

Sementara *Subprime Mortgage* pada umumnya diberikan kepada individu yang tidak memiliki profil resiko baik, atau yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan dalam transaksi kredit. Bentuk kredit *Subprime Mortgage* tidak mengharuskan dokumentasi pendapatan yang berbelit seperti layaknya kredit perumahan tradisional yang mengharuskan peminjam melalui tahapan estimasi harga properti dan tahapan validasi pendapatan. Dari segi risiko *Subprime Mortgage* memiliki rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk kredit tradisional.

Tabel 4.1
Perbedaan Antara *Prime Mortgage, Alt-A Mortgage, Subprime Mortgage*

	Prime Mortgage	***Alt-A Mortgage***	***Subprime***
Lembaga Pemberi Kredit	Resiko Rendah	Resiko Sedang	Resiko Tinggi
	Diberikan kepada individu dengan profil resiko rendah	Diberikan kepada individu dengan profil resiko sedang	Diberikan kepada individu dengan profil resiko tinggi
Peminjam	Sulit didapatkan	Sulit didapatkan	Mudah didapatkan
	Tarif kredit paling rendah dibandingkan produk kredit perumahan lainnya	Tarif kredit sedang dibandingkan produk kredit perumahan lainnya	Tarif lebih mahal dibandinkan dengan produk kredit perumahan lainnya (bunga dan biaya administrasi)

Sumber: Arafat, 2009 : 28

Yang membuat *Subprime Mortgage* menarik bagi para penjamin kredit adalah bunga tinggi, yang berarti pengembalian dalam jumlah berlipat ganda. Selain karena bisa mendapatkannya dengan relatif lebih mudah dibandingkan kredit properti lain, para individu-individu juga dapat melakukan *refinancing* (pembayaran mundur) terhadap properti yang sudah mereka miliki. Sayangnya, para pemberi kredit tidak menginformasikan dengan jelas bahwa setelah 2 (dua) tahun, mereka akan dikenakan bunga yang lebih tinggi hingga 2 (dua) kali lipat dari bunga tahun sebelumnya.

Dengan adanya *Credit Default Swap* (CDS), yaitu sebuah asuransi yang menjamin apabila terjadi kegagalan pembayaran, para investor pun tidak segan-segan untuk membidik surat hutang *subprime* sebagai sasaran investasi yang menguntungkan. *Credit Default Swap* adalah sebuah mekanisme *hedge fund* dimana pihak bank akan membayarkan sejumlah uang secara regular (premi) kepada pihak ketiga, umumnya perusahaan asuransi, sebagai imbalan atas jasa pihak ketiga tersebut yang akan membayarkan kerugian pihak bank bilamana terjadi peristiwa gagal bayar. Umumnya, mekanisme ini digunakan oleh bank untuk memproteksi diri dari guncangan finansial akibat kenaikan bunga atau akibat kenaikan harga komoditi (Arafat, 2009 : 4).

Dari sisi pemberi kredit (lembaga investasi), produk *Subprime Mortgage* sangat menguntungkan, terutama karena pemerintah Amerika Serikat "memperbolehkan" pemberian kredit kepada individu yang memiliki *credit history* yang kurang baik. Keputusan pemerintah tersebut membuka peluang pasar baru bagi para pemberi kredit. Perluasan target pasar memberi tambahan jumlah kredit perumahan yang dapat diberikan, yang berarti juga memberi tambahan pemasukan yang diterima dari bunga kredit perumahan. Di samping itu, sejak tahun 2005, obligasi kredit perumahan mulai meramaikan pasar modal Amerika Serikat, terutama untuk produk-produk *subprime*.

Berbagai bank di Amerika Serikat berbondong-bondong menjual surat hutang *subprime* kepada pasar. Dengan demikian berbagai bank tersebut mendapatkan keuntungan yang bersumber tidak hanya dari imbalan kredit, namun juga dari penjualan surat hutang tersebut. Keuntungan yang diraup, dipergunakan

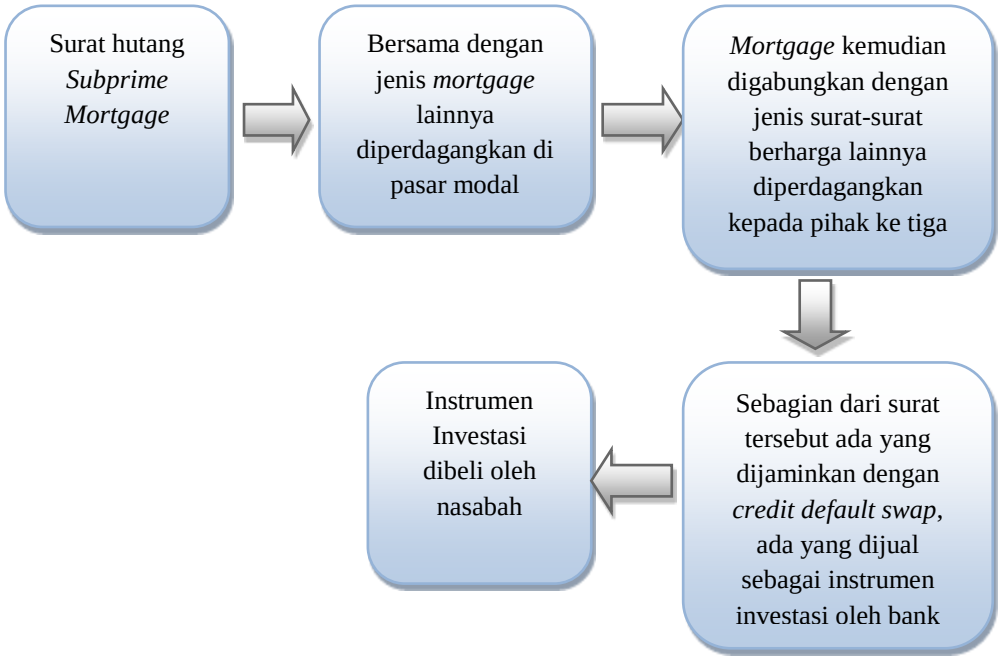
untuk menambah kredit kepada masyarakat. Bank kemudian menjual sebagian portofolio tersebut kepada bank investasi. Oleh bank investasi, kumpulan utang tersebut dijual kepada investor di seluruh dunia seperti bank komersial, perusahaan asuransi, maupun investor perorangan.

Dapat dikatakan bahwa memang sistem perkreditan *subprime* adalah sistem perkreditan yang cenderung tidak berhitung dengan kemungkinan. Dilihat dari mekanismenya, sistem ini memang sengaja "menciptakan" masalah, agar dari masalah tersebut keuntungan dapat diraih. Artinya, dengan menyalurkan kredit tanpa melihat *history profile* dari sang peminjam, lembaga pemberi pinjaman menyalurkan kredit sambil menunggu dan berharap bahwa ada satu atau dua peminjam yang gagal bayar. Memberi pinjaman tanpa melihat *history profile* adalah sebuah kesengajaan sistemik yang dibuat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak. Yang menanggung akibat dari ini semua adalah warga yang melakukan pinjaman untuk membeli rumah tinggal. Di pundak merekalah masa depan sirkulasi kredit dijamin (Arafat, 2009 : 33).

Dengan gagal bayar, berarti lembaga pemberi kredit mendapatkan keuntungan dengan melakukan penyitaan properti terhadap peminjam macet, setelah sebelumnya peminjam macet membayar teratur mengikuti konsekuensi bungan pinjaman. Rumah-rumah yang akan dipoles sedemikian rupa dan dijual kembali kepada calon peminjam baru. Namun masalahnya menjadi lain, ketika hampir keseluruhan peminjam gagal bayar, maka petaka benar-benar tidak bisa dikendali. Gagal bayar secara masal akan berakibat pada mengeringnya likuiditas lembaga pemberi pinjaman properti yang meminjam dari bank komersil,

selanjutnya bank investasi yang membeli hipotik tersebut dari bank komersial, selanjutnya masyarakat biasa yang mengalami kerugian, yang melakukan investasi dengan membeli surat hutang kredit perumahan yang dipoles sedemikian rupa oleh bank investasi.

Gambar 4.1
Perjalanan *Subprime Mortgage* Menjadi Instrumen Investasi



Sumber: http://paul.kedrosky.com – Arafat, 2009 : 6

Dari alur yang sudah dipaparkan, kita melihat bahwa produk *Subprime* memang rentan mengalami resiko kerugian yang tinggi, yang berpotensi menjatuhkan portofolio suatu bank. Karena kombinasi yang dibangun dalam fasilitas *Subprime* sangat "berbahaya, misalnya longgarnya aturan tentang profil peminjam, suku bunga pinjaman yang mengambang, dan permohonan pengajuan yang singkat. Jika suku bunga acuan bank sentral dinaikan sedikit saja karena

alasan ekonomi tertentu, maka akan berdampak kepada meningkatnya risiko kegagalan pembayaran para debitor yang akhirnya menyebabkan adanya *Multiplier Effect* yang berdampak pada kerugian investor dan perbankan (Arafat, 2009 : 6).

Pada saat ketika suku bunga kredit pemilikan rumah berubah pada akhir tahun kedua menjadi *adjustable rate* (suku bunga penyesuaian) dari 1-2 % menjadi 5 %, kewajiban pembayaran bulanan konsumen meningkat secara drastis. Hal ini menyebabkan konsumen yang memang kurang layak mendapatkan kredit, mengalami kesulitan membayar cicilan KPR sehingga banyak kasus gagal bayar. Menurunnya pertumbuhan sektor perumahan yang dimulai pada tahun 2006, ditandai dengan peningkatan harga rumah dan suku bunga kredit properti juga dipengaruhi oleh *predatory lending practice* (kecurangan dalam penyaluran kredit) oleh penyalur kredit properti (Novianti, 2009 ; 2).

Ketika Bank Federal Amerika, *The Fed*, menaikan suku bunga pada tahun 2006, *Subprime Mortgage* mengalami kemacetan. Banyak pemilik rumah yang menyerah karena tidak mampu membayar cicilan utangnya karna bunga kredit yang dipatok lembaga investasi juga meningkat, sehingga peminjam rumahnya untuk disita oleh bank. Kondisi ini terjadi tidak pada satu atau dua pemilik rumah, tetapi pada banyak pemilik rumah dengan *Subprime Mortgage*. Pasar perumahan menjadi kelebihan beban serta *bad debt ratio* yang tinggi. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi sektor properti di Amerika Serikat.

Turun naiknya suku bunga acuan yang diambil oleh Bank Sentral—karena merupakan kebijakan institusi tersebut—akan berdampak secara signifikan

terhadap aktivitas perdagangan. Sebab suku bunga bank sentral akan menjadi acuan bagi institusi keuangan lain untuk memperbaharui suku bunganya berdasarkan acaun tersebut. Dalam arti ini, ketika *The Fed* menaikan suku bunganya, maka mau tidak mau lembaga keuangan yang terkait dengan kredit perumahan akan menaikan tingkat suku bunga pinjamannya. Suku bunga pinjaman yang dinaikan akan "memaksa" warga peminjam kredit, membayarkan cicilan hutangannya dengan bunga yang tinggi, padahal sebelumnya cicilan hutang dibayar dengan bunga rendah, karena suku bunga pinjaman telah dirancangkan sedemikian rupa agar rendah terhadap peminjam *mortgage*, sebelum akhirnya dinaikan.

Meskipun penyimpangan dari kredit perumahan sudah mulai meningkat secara masif sejak triwulan kedua 2005, namun baru pada triwulan terakhir 2006-an tanda-tanda dari permasalahan muncul pada pasar perumahan dan kredit kepemilikan rumah AS. Sejumlah indeks menunjukan bahwa para investor sudah memprediksi penurunan harga rumah secara tajam. Turunnya harga rumah berarti nilai produk penjamin yang diciptakan sebagai hipotik – kredit perumahan dan produks sejenis lain merosot (Arafat, 2009 : 53).

Pada tanggal awal Februari 2007, salah satu bank terbesar Eropa, *HSBC Holdings*, secara khusus menyatakan naiknya kredit macet pada portofolio kredit perumahannya untuk Amerika Serikat sebagai sebab dari menurunnya laba bank tersebut. Kurang dari dua bulan kemudian, *New Century*, salah satu penyedia kredit perumahan terbesar di Amerika Serikat mengajukan permohonan pailit. Pada Juni 2007, sebuah bank investasi terbesar di Amerika Serikat *Bear Stearns*

mengumumkan kerugian yang serius yang dialami oleh sejumlah *hedge fund*-nya yang mengkhususkan diri pada *Collateralized Debt Obligations* (CDO), yaitu obligasi bundel ulang kredit perumahan (*bundled repacked mortgage*). Seturut dengan berjalannya waktu, *Standard & Poor's* dan *Moddy's* yang merupakan dua lembaga pemeringkat terkemuka di AS mulai menurunkan peringkat obligasi dan surat berharga lainnya yang berhubungan dengan kredit perumahan serta hipotiknya (Overtveldt, 2009 : 143).

Selama semester kedua Juli 2007, meningkatnya kecemasan dan kehati-hatian mulai terjadi pada industri finansial. Hal ini menyebabkan adanya kecurigan pada produk-produk sekuritas. Ketakutan akan terjadi masalah dalam industri keuangan menjadi kenayataan ketika pada 9 Agustus 2007, bank sentral baik AS dan Eropa menyuntikan dana miliaran dollar untuk mencegah mengeringnya likuiditas yang ada. Bank Sentral Eropa menyuntikan €95 miliar dan *The Fed* US$ 38 miliar, namun hal itu sudah sedikit terlambat karena apa yang awalnya merupakan koreksi pada pasar kredit perumahan AS yang terlalu ekspansif dengan cepat berubah menjadi awal mula krisis kredit dan likuiditas internasional (Arafat, 2009 : 53).

Pada pertengahan Januari 2008,data-data terbaru tentang perekonomian AS semakin memperjelas bahwa kemungkinan terjadinya resesi meningkat secara nyata. Pada awal Januari 2008, *Citigroup* mengumumkan kerugian pada triwulan keempat sekitar US$ 18 Juta. Hal ini diperparah dengan pergerakan lembaga pemeringkat yang terus menurunkan rating lembaga dan produk keuangan. Akibat dari ketakutan terjadinya resesi, *The Fed* melakukan kebijakan yang sangat

mengejutkan dengan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 75 basis poin hingga level 3,5 %. Pada tanggal akhir Januari 2008 *The Fed* kembali menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin, menjadi 3%. Penurunan tingkat suku bunga dalam keadaan kondisi ekonomi yang krisis, mesti dijalankan agar ekonomi tidak lesu dan terjatuh pada resesi. Penurunan tingkat suku bunga adalah kebijakan untuk pelonggaran gerak uang. Artinya, ketika kredit mengalami kemacetan, atau katakanlah krisis, praktis seluruh pihak yang bersangkut paut dengan uang akan mengalami penurunan daya penggunaan uang. Kredit akan susah dibayarkan jika suka bunga tetap tinggi. Sebaliknya, kebijakan suku bunga perlu diambil jika pertumbuhan ekonomi sedang bagus.

Pada tanggal 20 Februari 2008, *Credit Suisse* (CS), yang selama ini merupakan sebagai salah satu bank yang "aman", mengumumkan kerugian sebesar US$ 2,85 miliar akibat dari produk kredit terstuktur. Pada Maret 2008, permasalah kredit mencapai level yang terbaru dan semakin jelas masalah kekurangan likuiditas yang terjadi di industri finansial yang mengakibatkan masalah makin menggunung. Selanjutnya, *Bear Strearns* menjadi pemain utama dalam perjalanan krisis finansial. *Bear Strearns* yang telah berumur 85 tahun adalah yang paling kecil diantara lima bank investasi utama di AS seperti *Morgan Stanley*, *Goldman Sachs*, *Merrill Lynch* dan *Lehmans Brothers* (Overtveldt, 2009 : 157).

Bear Strearns mengalami permasalahan krisis kredit yang semakin masif. Beberapa bank besar menolak permintaan *Bear Strearns* untuk mendapatkan kredit jangka pendek sebesar US$ 2 miliar. Ini merupakan pukulan telak karena

jenis kredit ini adalah darah bagi perusahaan seperti *Bear Strearns*. Kejadian ini memicu penarikan kredit secara massif dan tiba-tiba, *Bear Strearns* menghabiskan cadangan likuiditas sebesar US$ 17 miliar dalam waktu kurang dari tiga hari dan harga sahamnya anjlok di lantai bursa. Persoalan krisis pada perusahaan investasi di Amerika semakin mengelembung. Dua perusahaan raksasa yaitu *Fannie Mae* dan *Freddei Mac* menjadi sorotan. Kekhawatiran akan pailitnya *Fannei Mae* dan *Freddei Mac* terus bergulir membuat harga saham kedua perusahaan ini jatuh. Hanya dalam satu tahun saham kedua perusahaan tersebut kehilangan 85 poin nilainya, sebagian besar akibat kekhawatiran investor akan kerugian portofolio kredit perumahan kedua perusahaan tersebut. Pada akhirnya, pemerintah mengambil alih kedua perusahaan tersebut dengan lebih dulu melakukan *bail-out* (Arafat, 2009 : 54).

Tidak berselang lama setelah nasionalisasi *Freddie* dan *Fannie*, raksasa asuransi *Amerika Internaitonal Group* (AIG dan bank tentu Investasi Lehman Brothers) mengambil peran dari rentetan kejadian krisis *Subprime Mortgage* - krisis ekonomi Amerika Serikat- yang berdampak pada krisis finansial global. AIG adalah perusahaan asuransi terbesar di dunia, dengan aset lebih dari US$ 1 triliun Dollar dan lebih dari 100.000 ribu karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini menderita kerugian sebesar US$ 18,5 miliar selama sembilan bulan sampai Juni 2008. AIG menyediakan US$ 440 miliar dana asuransi atas berbagai jenis produk utang, khususnya CDS. Pasar CDS kurang lebih diperkirakan sebesar US$ 60 triliun, dan AIG merupakan perusahaan yang memiliki peran besar dalam pasar CDS dengan hampir seluruh lembaga keuangan di dunia. Dengan meningkatnya

klaim atas kontrak asuransi yang dijaminkan ke AIG, maka AIG dipastikan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Akhirnya *The Fed* memberikan pinjaman US$ 85 miliar dan 80% saham AIG sebagai jaminannya (Arafat, 2009 : 57).

Baru tepat pada tanggal 15 September, salah satu kejadian gempa krisis melanda Amerika Serikat, gempa yang menciptakan "tsunami" pasar uang di seluruh dunia. Salah satu perusahaan keuangan terbesar dan terlama Amerika Serikat, *Lehman Brothers* menyatakan bangkrut. *Lehman Brothers* menjadi "korban" terbesar akibat krisis yang terjadi di Amerika Seikat dan peristiwa ini merupakan peristiwa kebangkrutan terbesar bank investasi di Amerika Serikat sejak tahun 1990. Kebangkrutan *Lehman Brothers* menjadi peristiwa penting dalam rangkaian krisis kredit Amerika Serikat, karena kebangkrutan perusahaan yang sudah berdiri dari 150 tahun ini menandai betapa besarnya tingkat intensitas krisis keuangan Amerika Serikat yang berujung pada krisis keuangan global. Baik para investor pereorangan dan individu serta perusahaan-perusahaan yang menerima pinjaman modal maupun perusahaan yang terikat CDS dengan *Lehman Brothers* ikut merasakan dampak negatifnya. Berikut ini, akan penulis tabel-kan secara ringkasan kronologis dari perjalanan krisis ekonomi di Amerika Serikat.

Tabel 4.2
Linimasa Krisis Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2008

Tanggal	Keterangan
16 Maret 2008	Bank investasi, *Bear Stearns* dijual murah kepada *JP Morgan Chase* hanya US$ 236 juta. Akuisisi itu dimotori oleh Bank Sentral AS.

7 September 2008	Departemen Keuangan AS mengambil alih dua perusahaan pembiayaan rumah terbesar AS yaitu *Fannie Mae* dan *Freddie Mac*, sekaligus memberikan jaminan atas utang masing-masing institusi sebesar US$ 100 miliar.
15 September 2008	o Bank investasi raksasa *Wall Street*, *Lehman Brothers* mendaftarkan perlindungan kebangkrutan, setelah gagal mendapatkan investor, termasuk pemerintah AS yang tak mau memberikan *bailout*. o Di hari yang sama, *Merrill Lynchn* mengumumkan kesepakatan untuk diakuisisi oleh BOA (*Bank Of America*) dengan nilai transaksi US$ 50 miliar. o Lembaga pemeringkat menurunkan peringkat utang AIG. Saham perusahaan asuransi ini juga merosot hingga 60,8%. o Bank Sentral AS menyuntikkan US$ 70 miliar ke pasar. Indeks *Dow Jones* Industrial Average merosot hingga 504 poin atau 4,42%. Ini adalah kemerosotan terbesar sejak September 2001. Bursa bursa Eropa pun ikut bertumbangan.
16 September 2008	Pemerintah AS akhirnya menyelamatkan AIG melalui suntikan modal hingga US$ 85 miliar, dengan imbalan 79,9% saham perusahaan asuransi raksasa itu. *The Fed* kembali menyuntik pasar hingga US$ 50 miliar.
17 September 2008	Saham-saham kembali berjatuhan karena ketidakpastian ekonomi. Indeks *Dow Jones* merosot hingga 449 poin (4,06%). Bapapem (Badan Pengawas Penanaman Modal) AS juga mengeluarkan larangan untuk sejumlah transaksi *short-selling*, yaitu pembelian saham dengan harga yang sangat rendah, untuk kemudian dijual lagi saat pergerakan harga saham tinggi.

18 September 2008	○ *The Fed* dan beberapa bank sentral dunia menyuntikkan US$ 300 miliar ke pasar kredit. Saham-saham kembali menguat setelah diumumkannya rencana *bailout*. ○ Menkeu AS Henry Paulson dan Gubernur *The Fed* Ben Bernanke memulai pembicaraan untuk paket penyelamatan ekonomi melalui pembelian aset-aset beracun dari lembaga keuangan. Indeks *Dow Jones*
19 September 2008	Pemerintah AS meminta kongres untuk segera menyetujui rencana penyelamatan US$ 700 miliar, yang merupakan rencana penyelamatan ala 'BLBI' yang terbesar dalam sejarah.
21 September 2008	○ *The Fed* kembali memompakan US$ 20 miliar ke pasar kredit. Saham-saham global kembali menguat. ○ *The Fed* mengumumkan *Goldman Sachs* dan *Morgan Stanley* --- dua bank investasi yang masih tersisa di *Wall Street* --- akhirnya menanggalkan status bank investasi dan menjadi perusahaan *holding bank*.
24 September 2008	Presiden Bush secara nasional memberikan pidato yang menyatakan bahwa perekonomian AS berada dalam bahaya jika kongres tidak memberikan persetujuan atas rencana bailout tersebut.
26 September 2008	WAMU (*Washington Mutual*), bank terbesar di AS kolaps. *JP Morgan Chase* selanjutnya membeli sebagian aset WAMU senilai US$ 1,9 miliar.
29 September 2008	DPR AS menolak rencana *bailout* melalui voting 228-205, dengan Republik paling banyak menolak rencana tersebut. Indeks *Dow Jones* pun merosot hingga 778 poin, atau terbesar dalam sejarah.

1 Oktober 2008	Senat menyetujui paket penyelamatan ekonomi darurat, yang termasuk didalamnya adalah pengurangan pajak dan kenaikan penjaminan untuk simpanan bank dari 100.000 Dollar AS menjadi US$ 250.000.
3 Oktober 2008	DPR AS menyetujui UU Penyelamatan Ekonomi melalui *bailout* dalam voting 263-171. Presiden Bush selanjutnya menandatangani UU tersebut, sementara Menkeu Henry Paulson diminta segera bergerak cepat membeli aset-aset beracun dari sektor finansial atau keuangan.

Sumber, Arafat 2009 : 9 dan Overtveldt, 2009 : 76

Karena sistem keuangan global yang saling terkait, interkoneksi, efek domino yang dihasilkan makin menjalar. Krisis yang berbasis di Amerika Serikat, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Direktur Pelaksana IMF saat itu, Dominique Strauss-Kahn menaksir akan terdapat kerugian sekitar US$ 1,4 triliun pada sistem perbankan global akibat kredit macet di sektor perumahan AS. Taksiran ini lebih tinggi, misalnya dari taksiran beberapa pengamat ekonomi yang memperkirakan kerugian sebesar US$ 945. Hal ini menyebabkan sistem perbankan dunia saling enggan mengucurkan dana, sehingga aliran dana perbankan, urat nadi perekonomian global, menjadi macet. Hasil analisa IMF saat itu mengingatkan, krisis perbankan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menyebabkan resesi.

Penulis mengikuti rekonstruksi Johan van Overtveldt tentang fase-fase krisis ekonomi di Amerika Serikat. Fase *pertama* adalah apa yang disebut periode peracikan, fermentase, antara Agustus 2007 sampai maret 2008, yang didominasi anggapan umum bahwa krisis ini dapat diatasi dengan pendekatan per-kasus, serta

efeknya terhadap pertumbuhan riil hanya berupa perlambatan pertumbuhan, bukan resesi penuh. Fase *kedua* ditandai dengan keruntuhan *Bear Streams* dan upaya penyelamatan terhadapnya yang disponsori oleh Bank Sentral, yang diikuti dengan kekhawatiran akan adanya risiko sistemik dan resesi ekonomi. Fase *ketiga* dimulai ketika "bisul" pecah, pada tanggal 15 September *Lehman Brothers* jatuh, dan *Fannie Mae, Freddie Mac*, serta AIG dinasionalisasi. Fase *keempat* dimulai ketika krisis tersebut menyebar, menyeberang lautan menghantam sistem perbankan Eropa. Kita akan membahas penyebaran tersebut di sub judul bab berikut. Namun sebelumnya, perlu dikatakan bahwa fase-fase krisis tersebut saling terkait satu sama lain, meskipun skala kerusakan dari fase-fase tersebut berbeda (Overtveldt, 2009 : 185).

4.1.2 Penyebaran Krisis Amerika Serikat Tahun 2008 dan Dampaknya Ke Tingkat Global

Sederet bank di Eropa juga menjadi korban krisis Amerika, sehingga pemerintah di Eropa harus turun tangan menolong dan mengatasi masalah perbankan mereka. Pemerintah Belgia, Luksemburg, dan Belanda menstabilkan *Fortis Group* dengan menyediakan modal Euro €11,2 miliar atau sekitar Rp 155,8 triliun untuk meningkatkan solvabilitas dan likuiditasnya. Namun *Fortis* akhirnya dinasionalisasikan. Bank terbesar kedua di Belanda dan perusahaan swasta terbesar di Belgia ini memiliki 85.000 pegawai di seluruh dunia dan beroperasi di 31 negara, termasuk Indonesia. Ketiga pemerintah itu memiliki 49% saham

Fortis. *Fortis* menjual kepemilikannya di *ABN AMRO* yang dibelinya kepada pesaingnya, *International Netherland Group* (ING).

Pemerintah Jerman dan konsorsium perbankan, juga menyelamatkan Bank *Hypo Real Estate*, bank terbesar pemberi kredit kepemilikan rumah di Jerman. Pemerintah Jerman menyiapkan dana €35 miliar atau sekitar Rp 486,4 triliun berupa garansi kredit. United Kingdom juga tak kalah sibuk. Kementerian Keuangan Inggris menasionalisasi bank penyedia KPR, *Bradford* & *Bingley*, dengan menyuntikkan dana Pound £50 miliar atau Rp 864 triliun. Pemerintah Inggris juga harus membayar £18 miliar untuk memfasilitasi penjualan jaringan cabang *Bradford* & *Bingley* kepada *Santander*, bank Spanyol yang merupakan bank terbesar kedua di Eropa. *Bradford* & *Bingley* merupakan bank Inggris ketiga yang terkena dampak krisis finansial atau keuangan AS setelah *Northern Rock* dinasionalisasi Februari lalu dan *Halifax Bank of Scotland* (HBOS) yang dijual pemiliknya kepada *Lloyds TSB Group* (Overtveldt, 2009 : 187).

Ekses dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat memberikan dampak negatif terhadap industri keuangan, hal ini bisa dilihat dari rontoknya berbagai lembaga keuangan global. Kondisi negatif menyebabkan krisis yang lebih parah lagi yaitu krisis kepercayaan, *distrust*. Berbagai bank semakin ragu untuk mengucurkan kredit, bahkan kredit untuk sektor riil. Hal inilah yang semakin mendukung terjadinya krisis likuiditas. Krisis yang menerpa institusi keuangan di Amerika Serikat, Eropa dan Asia nampaknya juga memberikan dampak buruk terhadap pasar saham, hampir seluruh bursa di dunia mengalami penurunan drastis.

Pasar modal di Amerika Serikat, Eropa dan Asia segera mengalami *panic selling* yang mengakibatkan jatuhnya indeks harga saham pada setiap pasar modal. Bursa saham di mana-mana terjun bebas ke jurang yang dalam. Pasar modal London mencatat rekor kejatuhan terburuk dalam sehari yang mencapai penurunan 8%. Sedangkan Jerman dan Prancis masing-masing ditampar dengan kejatuhan pasar modal sebesar 7% dan 9%. Pasar modal *emerging market* seperti Rusia, Argentina dan Brazil juga mengalami keterpurukan yang sangat buruk yaitu 15%, 11% dan 15%.

Sejak awal 2008, bursa saham China anjlok 57%, India 52%, Indonesia 41% (sebelum kegiatannya dihentikan untuk sementara), dan zona Eropa 37%. Sementara pasar surat utang terpuruk, mata uang negara berkembang melemah dan harga komoditas anjlok, apalagi setelah para spekulan komoditas minyak menilai bahwa resesi ekonomi akan mengurangi konsumsi energi dunia (Arafat, 2009 : 11).

Tabel 4.3
Penurunan Bursa Global Tahun 2008

Bursa Efek	8 September 2008	8 Oktober 2008	Persen
IHSG (Indonesia)	2.038	1.451,67	-28,77
Nikkei (Tokyo)	12.624,48	9.203,32	-27,09
Hang Seng (Hong Kong)	20.794,27	15.431,73	-25,79
Straits Times (Singapura)	2.694,49	2.033,70	-24,53
Financial Times (London)	5.446,30	4.366,70	-19,82

Sumber: Novianti, 2009 : 4

Dari tabel diatas, kita mendapat gambaran bahwa selamat jangka waktu satu bulan antara September sampai dengan Oktober, terjadi penurunan indeks harga saham secara besar-besaran diberbagai bursa global. Rata-rata penurunan ini tercatat sekitar 20%. Hal ini salah satunya terjadi akibat dari penarikan modal besar-besaran oleh investor yang panik, *capital outflow*, akibat krisis likuiditas yang terjadi di Amerika Serikat.

Pada akhir September, terlihat semakin gamblang bahwa Eropa menghadapi masalah besar dan stratyegi sebelumnya yang dipakai—yaitu masing-masing negara bertindak sendiri-sendiri mengatasi krisis—tidak efektif. Pada 1 Oktober, presiden Nicolas Sarkozy mengusulkan dibentuknya dana bersama Eropa untuk mengatasi kegagalan perbankan, tetapi rencana ini ditentang oleh pemerintah Jerman. Ketakuan akan terulangnya depresi besar tahun 30-an menjalar kemana-mana dan membuat pasar kehilangan keseimbangan (Overtveldt, 2009 : 188)

Semakin banyak bank di Eropa berhamburan mencari dukungan dari pemerintah. Pasar antar bank berhenti total karena saling curiga. Harga saham-saham ekuitas terjun bebas. Obral murah besar-besaran dipicu dengan *fire sales* oleh *hedge fund* yang ditimpa masalah keuangan, kerugian besar di pasar kredit, dan pembayaran kontrak asuransi (CDS) yang luar biasa besar atas obligasi gagal bayar Lehman, serta kekhawatiran akan resesi parah yang melanda seluruh dunia. Dalam sebuah langkah yang terkordinir bersama, beberapa bank sentra seperti *The Fed*, *Europe Central Bank* (ECB), *Bank of England*, dan bank-bank sentral Swiss,

Swedia, serta Kanada melalukan pemangkasan tingkat suku bungan kebijakan mereka 50 basis poin pada 8 Oktober.

Langkah yang penting terkait penyelamatan ini adalah pengumuman Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, tentang rencana penyelamatan besar sampai mencapai £400 miliar. Dengan rincian, £50 miliar untuk merekapitulasi bank-bank Inggris, £250 milliar untuk menjamin keberlangsungan pasar antar bank, dan £100 milliar dalam bentuk likuiditas ekstra. Menurut Overtveldt, rencana Gordon ini berhasil menginspirasi sebuah pertemuan darurat kepala pemerintahan anggota Zona Euro (karena Inggris bukan termasuk Zona Euro). Pertemuan itu menyimpulkan bahwa negara-negara anggota perlu bekerja sama dalam usaha yang mantap untuk merekapitulasi perbankan dan meningkatkan kepercayaan lewat garansi utang bagi sektor tersebut. Jerman dengan segera mengumumkan pemerintahan mereka akan menyisihkan €500 miliar untuk keperluan ini, Perancis menyediakan €360 miliar, dan Belanda €200 miliar (Overtveldt, 2009 : 189).

Meski komposisi portfolio invetasi asing di kelompok negara berkembang tidak berhubungan langsung dengan *Subprime Mortgage*, namun dampak yang dirasakan tidak kalah serius dengan yang dirasakan oleh negara-negara maju yang lebih jelas keterkaitannya. Pengeluaran instrumen-instrumen sekuritisasi di kelompok negara berkembang menjadi terhenti, pinjaman luar negeri yang berasal dari bank menjadi sangat terbatas dengan bunga yang tinggi, *spread* surat obligasi melonjak tinggi, harga-harga ekuitas menurun, dan pasar uang menghadapi tekanan besar. Bersamaan dengan gangguan arus dana masuk (*capital inflow*),

nilai tukar mata uang negara-negara berkembang juga mengalami tekanan depresiasi akibat tingginya permintaan Dollar Amerika oleh para investor yang memilih untuk memegang "asset aman" yaitu Dollar, serta tingginya arus *capital outflow* yang memaksa pemerintah negara-negara berkembang untuk menggunakan devisanya demi mempertahankan nilai tukar mata uang negara tersebut (Arafat, 2009 : 86).

Kelompok ekonomi berkembang, khususnya yang menggantungkan diri terhadap pemodalan asing, mendapatkan respon negatif dari para investor karena kekhawatiran mereka akan stagnasi ekonomi. Di samping itu, faktor-faktor *endogenus* negara-negara berkembang, seperti: lemahnya sistem manajemen risiko, ketimpangan yang terjadi pada *balance sheet*, dan pertumbuhan cepat nilai kredit bank juga turut melemahkan posisi negara-negara berkembang pada masa krisis ini. Akibatnya adalah kondisi cadangan devisa mengalami penurunan cukup tajam yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar dari segi pemerintah negara-negara tersebut. Beberapa negara kawasan Asia dan Afrika pada akhirnya terpaksa berpaling kepada IMF untuk bantuan finansial. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan dan Pakistan. Artinya, meski secara sebab kelompok negara-negara berkembang tidak terkait dengan apa yang disebut *Subprime Mortgage*—karena sebagaimana sudah dijelaskan menyangkut komposisi portofolio—tetapi secara akibat, secara musababnya saling terkait dampak krisis antara semua negara yang berhubungan dengan Amerika Serikat (Arafat, 2009 : 87).

Krisis ekonomi global yang mencapai puncaknya pada triwulan terakhir tahun 2008, terus saja berlanjut pada awal tahun 2009. Ketidakstabilan di pasar keuangan global terjadi akibat kuatnya persepsi negatif dari berbagai kalangan terhadap prospek pemulihan ekonomi global serta masih memburuknya kinerja lembaga-lembaga keuangan terkemuka AS, seperti *Citigroup* dan AIG. Kondisi itu mengakibatkan investor mengurangi penempatan dana di pasar kredit dan pasar modal, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penurunan penempatan dana di negara berkembang juga dipengaruhi oleh persepsi risiko yang masih tinggi atas penempatan dana di negara berkembang.

Apa yang terjadi dalam perkembangan sektor keuangan global tersebut berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Proses konsolidasi dan ketidakpastian yang terjadi di sektor keuangan mengakibatkan aliran likuiditas ke sektor riil menjadi tersendat dan berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi global. Kita akan melihat dua jalur dampak krisis ekonomi Amerika Serikat ini dan bagaimana dan lewat jalur mana negara-negara di dunia terkena imbas dari krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008.

1. Dampak langsung: Kerugian yang dialami korporasi-korporasi besar di dunia yang berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat bermasalah, misalnya lembaga keuangan yang menanam dana dalam instrumen keuangan *Lehman Brothers*, atau lembaga-lembaga keuangan lain yang terkait dengan kredit perumahan.

2. Dampak tidak langsung

   - Pengaruh terhadap momentum pertumbuhan ekonomi, dimana terjadi pengeringan likuiditas, lonjakan suku bunga, anjloknya harga komoditas dan melemahnya pertumbuhan sumber dana.
   - Menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada.
   - *Flight to quality*, pasar modal Indonesia terjun bebas dengan indikasi melemahnya mata uang rupiah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah apabila para investor yang saat ini masih memegang aset keuangan likuid di Indonesia mulai melepas aset-aset tersebut karena alasan *flight to quality*.
   - Nilai tukar mata uang melemah.
   - Kurangnya pasokan likuiditas di sektor keuangan karena kebangkrutan berbagai institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi akan berdampak pada *cash flow sustainability* perusahan-perusahaan korporasi besar di Indonesia, sehingga pendanaan ke *capital market* dan perbankan global akan mengalami kendala dari sisi *pricing* (suku bunga) dan *avaibility* (ketersediaan dana).
   - Menurunnya tingkat permintaan dan harga komoditas-komoditas utama ekspor tanpa diimbangi peredaman laju impor secara signifikan akan menyebabkan defisit perdagangan (*trade deficit*) yang semakin melebar dalam jangka menengah.

- Selanjutnya, defisit perdagangan tersebut akan menyulitkan penggalangan *capital inflow* dalam jumlah besar untuk menutup defisit itu sendiri seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global.

Dari dua jalur tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa krisis Amerika Serikat yang berdampak pada negara berkembang, salah satunya Indonesia, melewati jalan kedua. Perusahaan-perusahaan Indonesia tidak terkait secara langsung dengan kasus *Subprime Mortgage*, menyangkut surat hutang, investasi perumahan, saham, obligasi, asuransi, dan segala macam derivasinya. Tegasnya, perusahaan industri Indonesia tidak bermain dalam pasar kredit tersebut (Bank Indonesia, 2009 : 20).

Lembaga keuangan internasional, seperti IMF beberapa kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2009. Pada April 2009, IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi 1,3%, sangat rendah dibandingkan dengan proyeksi November 2008 yang tumbuh positif 2,2% Kontraksi perekonomian global banyak dipengaruhi oleh kontraksi perekonomian negara maju, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang dimotori oleh China, India dan Indonesia cenderung tumbuh positif.

Sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut, perdagangan dunia juga mengalami kontraksi. Volume perdagangan dunia tahun pada April 2009 mengalami kontraksi sebesar 11,0%, jauh di bawah kinerja tahun 2008 yang tumbuh positif 3,0%. Kontraksi volume perdagangan tersebut merupakan yang terendah sejak angka *World Trade Volume* mulai dipublikasikan pada tahun 1970. Perekonomian beberapa negara Asia yang memiliki basis

perdagangan kuat juga mengalami kontraksi yang signifikan akibat tergerusnya kinerja ekspor seiring dengan anjloknya harga komoditas dan menurunnya permintaan negara maju. Penurunan pertumbuhan ekonomi global pada gilirannya berkontribusi pada masih rendahnya harga komoditas global dan lemahnya tekanan inflasi global. Permintaan terhadap komoditas global yang turun mengakibatkan harga komoditas, baik komoditas energi maupun komoditas nonenergi berada pada level rendah. Meskipun sudah sedikit meningkat sejak akhir Maret 2009, harga minyak dunia pada triwulan I 2009 masih di kisaran 48 dolar AS per barel Perkembangan harga komoditas tersebut dan perlambatan permintaan global secara keseluruhan telah mengurangi tekanan inflasi di negara maju dan negara berkembang (Bapennas, 2009 : 6).

Tabel 4.4
Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2008 - 2010

Kelompok Negara	**Periode**					
	Nov-08	Jan-09	Apr-09	Jul-09	Okt-09	Jan-10
Dunia	2,2	0,5	-1,3	-1,4	-1,1	-0,8
Negara Maju	-0,3	-2,0	-3,8	-3,8	-3,4	-3,2
AS	-0,7	-1,6 -	-2,8	2,6	-2,7	-2,5
UE	-0,5	-2,0	-4,2	-4,8	-4,2	-3,9
Jepang	-0,2	-2,6	-6,2	-6,0	-5,4	-5,3
Negera Berkembang	5,1	3,3	1,6	1,5	1,7	2,1
CIS	3,2	-0,4	-5,1	-5,8	-6,7	-7,5
Asia	7,1	5,5	4,8	5,5	6,2	6,5
China	8,5	6,7	6,5	7,5	8,5	8,5

India	6,3	5,1	4,5	5,4	5,4	5,6
ASEAN-5	4,2	2,7	0,0	-0,3	0,7	1,3
Timur Tenga	5,3	3,9	2,5	2,0	2,0	2,2
Western Hemisphere	2,5	1,1	-1,5	-2,6	-2,5	-2,3
Barang dan Jasa	2,1	-2,8	-11,0	-12,2	-11,9	-12,3

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2009 : 7

Dari table 4.4, kita bisa melihat bahwa dampak krisis secara umum banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang cenderung negatif. Seperti Amerika, Eropa, dan negara-negara persemakmuran Eropa Timur. Yang menarik bahwa negara berkembang yang sedang menggeliat seperti China, India, dan ASEAN (termasuk di dalamnya Indonesia) tumbuh positif, meski pertumbuhan postitif tersebut presentasenya menurun dari tahun-tahun sebelum krisis. Misalnya, sebelum krisis, angka pertumbuhan China selalu mencapai angka dua digit atau sekitar 10-12% tiap tahunnya (Kementerian Perdagangan, 2009 : 7).

Penurunan pertumbuhan ekonomi global pada gilirannya berkontribusi pada rendahnya harga komoditas global dan lemahnya tekanan inflasi global. Permintaan terhadap komoditas global yang turun mengakibatkan harga komoditas, baik komoditas energi maupun komoditas nonenergi berada pada level rendah. Meskipun sedikit meningkat sejak akhir Maret 2009, harga minyak dunia pada triwulan I 2009 masih di kisaran US$ 48 per barel. Perkembangan harga komoditas tersebut dan perlambatan permintaan global secara keseluruhan telah mengurangi tekanan inflasi di negara maju dan negara berkembang.

Ketidakpastian dan tekanan di perekonomian global akibat keketatan likuiditas global, direspons banyak negara dengan kebijakan yang cukup intensif, baik yang konvensional maupun yang nonkonvensional. Kebijakan konvensional antara lain ditempuh berbagai bank sentral melalui penyesuaian suku bunga kebijakan, hingga hampir menyentuh nol persen untuk beberapa negara maju. Kebijakan konvensional kemudian diperkuat oleh langkah-langkah kebijakan nonkonvensional di beberapa negara maju seperti memperluas basis agunan untuk operasi moneter bank sentral, memperpanjang jangka waktu bantuan likuiditas dan melakukan pembelian surat-surat berharga, termasuk yang berbasis sektor perumahan (*mortgage backed securities*). Kebijakan penjaminan simpanan di bank secara penuh (*blanket guarantee*), rekapitalisasi lembaga keuangan, dan pembatasan kerugian portofolio sektor perbankan juga ditempuh. Selain itu, kebijakan penyelamatan institusi keuangan juga dilakukan beberapa bank sentral di negara maju, termasuk Amerika Serikat dan Eropa guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta mencegah dampak yang lebih buruk pada perekonomian. Kuatnya tekanan di pasar keuangan tersebut juga mendorong *The Federal Reserve*, *Bank of England*, *European Central Bank*, *Bank of Japan*, dan *Swiss National Bank* melakukan perjanjian kerjasama guna meredakan keketatan likuiditas mata uang dolar AS di berbagai kawasan (Kementerian Perdagangan, 2009 : 8).

4.1.3 Upaya Pemerintah Amerika Serikat Menghadapi Krisis Ekonomi Tahun 2008

Pada beberapa sub bab judul diatas, selintas sudah dipaparkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi krisis ekonomi yang berpusat di negara adidaya tersebut. Upaya yang dilakukan datang dari dua arah, yaitu Bank Sentral sebagai pemegang independensi moneter dan pemerintah Amerika Serikat serta parlemen AS.

1. Departemen Keuangan AS mengambil alih dua perusahaan pembiayaan rumah terbesar AS yaitu *Fannie Mae* dan *Freddie Mac*, sekaligus memberikan jaminan atas utang masing-masing institusi sebesar US$ 100 miliar.
2. Bank Sentral AS menyuntikkan US$ 70 miliar ke pasar. Indeks *Dow Jones Industrial Average* merosot. Bursa bursa Eropa pun ikut bertumbangan
3. Pemerintah AS menyelamatkan AIG melalui suntikan modal hingga US$ 85 miliar dengan imbalan 79,9% saham perusahaan asuransi raksasa itu.
4. Bapapem (Badan Pengawas Penanaman Modal) AS juga mengeluarkan larangan untuk sejumlah transaksi karena saham-saham berjatuhan dalam ketidakpastian ekonomi.
5. *The Fed* menyuntikan US$ 20 miliar ke pasar kredit. Saham-saham global kembali menguat.
6. *The Fed* dan beberapa bank sentral dunia bersepakat menyuntikkan US$ 300 miliar ke pasar kredit. Saham-saham kembali menguat setelah diumumkannya rencana *bailout*.

7. Senat menyetujui paket penyelamatan ekonomi darurat, yang termasuk didalamnya adalah pengurangan pajak dan kenaikan penjaminan untuk simpanan bank dari US$ 100.000 menjadi US$ 250.000.
8. DPR AS menyetujui UU Penyelamatan Ekonomi melalui *bailout* dalam voting 263-171. Presiden Bush selanjutnya menandatangani UU tersebut, sementara Menkeu Henry Paulson diminta segera bergerak cepat membeli aset-aset beracun dari sektor finansial atau keuangan.
9. DPR AS menyetujui program penangan aset bermasalah yang memberi kewenangan kepada Departemen Keuangan hak membelanjakan US$ 700 miliar untuk membeli aset-aset berisiko.
10. Pemerintah AS menerapkan kebijakan *buy American* dalam paket stimulus fiskal.
11. Reformasi undang-undang pajak dalam membantu keuangan debitor agar bisa mendapat pinjaman lagi.
12. Pemerintah menambah jumlah surat berharga dalam lelang berkala (Overtveldt, 2009 : 182-184).

Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral maupun Pemerintah AS merupakan langkah umum yang sudah seharusnya dalam penyelamatan ekonomi untuk menghadapi krisis. Bank Sentral tentu memerlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan paket stimulus ekonomi. Dari paket stimulus kebijakan ekonomi tersebut, bank sentral dengan seluruh otoritas independennya bergerak untuk mengalirkan dana stimulus tersebut ke pasar yang bereaksi negatif. Artinya, bank sentral membutuhkan legalitas berupa kebijakan untuk bergerak jika kondisi

darurat sedang melanda ekonomi suatu negara (dalam hal ini pasar) dan jika diluar batas-batas otoritasnya sendiri. Pemerintah pun baru beraksi bila kondisi dalam pasar mengirimkan sinyal bahaya.

4.2 Interaksi Perdagangan Amerika Serikat dan Indonesia Sebelum Krisis

Interaksi perdagangan barang antara Amerika Serikat dan Indonesia selama periode lima atau enam tahun kebelakang sebelum krisis sama-sama memberi keuntungan bersama kepada masing-masing pihak. Amerika Serikat dan Indonesia dapat saling mengimpor atau mengekspor barangnya kepada masing-masing. Amerika Serikat merupakan salah satu pasar utama dari produk-produk Indonesia. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekspor barang Indonesia ke AS selama 2002-2007 adalah sebesar 5%. Sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan impor barang Indonesia dan AS selama kurun waktu yang sama, sebesar 2%. Ini artinya rata-rata tingkat pertumbuhan ekspor barang Indonesia ke AS lebih besar 3% daripada rata-rata impor barang Indonesia dari AS. Nilai surplus perdagangan ini mencapai US$ 85 Juta (Siregar, 2009 : 457).

Tabel 4.5
Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Pembayaran Amerika dan Indonesia, dalam Dollar Tahun 2002 - 2007

Tahun	Ekspor	Impor	Selisih
2002	2.555,80	9.643,40	-7.087,60
2003	2.516,40	9.515,10	-6.998,70
2004	2.671,40	10.810,50	-8.139,10
2005	3.053,90	12.014,30	-8.960,00

2006	3.078,50	13.424,70	-10.346,20
2007	4.234,80	14.301,30	-10.066,40
Total	18.110,80	69.709,30	-51.598.50

Sumber: Siregar, 2008 : 452

Tabel 4.5 merupakan gambaran neraca perdagangan yang memuat catatan transaksi perdagangan Amerika dan Indonesia selama kurun waktu enam tahun. Untuk membaca tabel tersebut dalam perspektif Indonesia, maka dibaca terbalik. Artinya impor adalah ekspor Indonesia ke AS, sedangkan ekspor adalah impor Indonesia dari AS. Apabila dibaca sebenarnya, maka ekspor adalah ekspor AS ke Indonesia, sedangkan impor adalah impor AS dari Indonesia. Berdasarkan tabel diatas, kita melihat bahwa nilai ekspor barang Indonesia ke AS lebih besar daripada nilai impor barang Indonesia dari AS. Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan, sedangkan AS sebaliknya, defisit.

Total nilai impor barang Indonesia dari AS selama kurun tahun 2002-2007 adalah US$ 18.110,80 juta, dan total nilai ekspor barang Indonesia ke AS selama kurun itu juga adalah US$ 69.709,30 juta. Pada masa sebelum krisis ekonomi tahun 1998, nilai ekspor barang Indonesia ke Amerika pada tahun 1997 terhitung nilainya sebesar US$ 5.454,07 miliar. Nilai ilmpor barang Indonesia dari AS yang tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar US$ 5.913.10 juta dan yang terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar US$ 2.038,40 juta. Nilai impor barang Indonesia dari Amerika Serikat yang terjadi pada masa peristiwa krisis keuangan melanda Amerika Serikat. Sementara impor barang Indonesia dari Amerika Serikat yang terendah terjadi pada masa krisis ekonomi melanda Indonesia, yaitu tahun 1999. Jika dirunut sedikit kebelakang, angka pertumbuhan impor barang Indonesia dari

Amerika Serikat mencapai titik rendah sebesar 49,6% pada tahun 1998 dimana Indonesia memasuki tahun pertama krisis ekonomi. Pertumbuhan impor barang Indonesia ke AS yang minus tersebut dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi sehingga kemampuan membeli barang impor dari Amerika Serikat, menurun drastis. (Siregar, 2008 : 453-455).

Angka pertumbuhan ekspor barang Indonesia ke Amerika Serikat yang terendah terjadi pada tahun 2002, sebesar -4,55%. Angka pertumbuhan ekspor Indonesia yang luar biasa terjadi pada tahun 2004 sebesar 13,61% dengan nilai ekspor sebesar US$ 10.810,50 juta. Pertumbuhan ekspor barang Indonesia ke Amerika Serikat sempat mengalami kelesuan sebelum akhirnya kembali membaik pada tahun 2008, sebesar 10,47%. Yang anehnya, membaiknya angka pertumbuhan ekspor Indonesia ini bersamaan dengan terjadinya krisis keuangan Amerika Serikat yang kemudian menjadi krisis keuangan global. Selama periode 2002-2008 Indonesia mengalami kenaikan surplus kecuali pada tahun 2002 dan 2003 (Siregar, 2008 : 456-457).

Produk-produk ekspor Indonesia ke AS adalah produk industri manufaktur dan produk pertanian. Misalnya tekstil, sepatu, kertas, perabotan rumah tangga, alat-alat pertanian dan produk-produk hasil pertanian. Kalau dilihat dari konteks keunggulan ekonomi, tampaknya memang produk-produk ekspor Indonesia lebih unggul dari AS, selain karena kualitasnya, produk-produk itupun memang lebih banyak menjadi basis produk industri Indonesia. Sebaliknya juga bahwa menurunnya neraca perdagangan AS terhadap Indonesia bukan karena kualitas, tetapi lebih kepada konsentrasi produksi industri AS yang bukan seperti

Indonesia. Dan penting bahwa pasar ekspor AS lebih terkonsentrasi kepada negara Eropa, Amerika Latin, dan China.

Dalam argumen yang seperti ini, bisa dilihat bahwa ketergantungan ekspor Indonesia ke AS lebih besar, sebab AS adalah salah satu pasar yang menjadi tujuan Indonesia. Sedangkan ketergantungan sebaliknya tidak terlalu besar. AS punya jangkauan pasar yang luas dari sekedar Indonesia. Keadaan ini menurut penulis memberi pasal bahwa Indonesia memang tergantung dengan AS, dan apa yang terjadi dengan ekonomi AS berdampak terhadap Indonesia. Penulis bisa mengatakan bahwa industri manufaktur Indonesia memiliki kans yang bagus di pasar Amerika, diantaranya termasuk Tekstil, Alas Kaki, dan Kertas. Kans ini tentu berkaitan dengan konsentrasi ekspor dan kualitas produk Indonesia. Ketiga produk manufaktur tersebut memiliki volume ekspor yang tinggi terhadap pasar Amerika dibandingkan impornya.

Tabel 4.6
Realisasi Ekspor Tekstil, Alas Kaki, dan Kertas ke Amerika Serikat Tahun 2004 - 2008

Industri	**Tahun**				
	2004	2005	2006	2007	2008
Tekstil	2.371.109.986	2.930.265.776	3.624.862.688	3.759.698.212	3.796.567.426
Alas kaki	468.713.427	472.167.651	450.319.110	383.962.965	393.952.553
Kertas	36.478.179	53.887690	160.635.342	217.690.216	164.197.414

Sumber: Pusdatin Kementerian Perdagangan, 2012

Tabel 4.7
Realisasi Impor Tekstil, Alas Kaki, dan Kertas dari Amerika Serikat Tahun 2004 - 2008

Industri	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Tekstil	286.910.356	284.253.771	283.375.826	374.065.319	582.413.560
Alas kaki	5.769.013	3.045.238	1.930.291	2.007.354	4.030.355
Kertas	30.218.960	31.760.057	26.308.236	42.693.635	67.548.427

Sumber: Pusdatin Kementerian Perdagangan, 2012

Angka-angka dari kedua tabel 4.6 dan 4.7 menunjukan bahwa kapasitas ekspor ketiga subsektor manufaktur terhadap pasar AS lebih menonjol dibandingkan dengan pasar di negara Uni Eropa, misalmya Perancis, Belanda, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya. Selain itu, kedua tabel itu juga menunjukan bahwa bagaimana dalam interaksi perdagangan dalam sektor manufaktur tersebut, Indonesia lebih menonjol dari AS sendiri. Dalam hal ini, tektsil menjadi produk yang unggul dalam ekspor, dibandingkan kedua subsektor lain. Kemungkinan ini terjadi karena di Indonesia sendiri, tekstil adalah salah satu subsektor industri yang tumbuh pesat sejak lama. Indonesia memiliki sumber daya alam yang menunjang dalam sektor tesktil dibandingkan yang lain. Tapi tentu saja, kedua subsektor lain tersebut tetap menjadi andalan ekspor Indonesia.

Penting untuk diketahui bahwa pada tahun 2006, industri lokal kertas berlapis di Amerika Serikat (AS) mengajukan tuduhan dumping dan subsidi terhadap kertas berlapis yang diekspor Indonesia, Cina dan Korea ke AS. Industri lokal AS ini menganggap bahwa mereka telah dirugikan dan meminta pengenaan bea masuk anti dumping serta bea masuk imbalan atas impor kertas berlapis

tersebut. Masalah ini terjadi karena AS menuduh Indonesia melakukan subsidi atas produk manufaktur, dalam hal ini produk kertas. Pengenaan bea-bea tersebut menyebabkan ekspor kertas berlapis dari Indonesia ke AS menjadi tidak kompetitif lagi. Pemerintah AS juga mengaitkan tuduhan praktek subsidi dengan program Hutan Tanaman Industri (HTI) yang memberi keringanan suku bunga sebagai bentuk subsidi terselubung karena nilai jual kayu yang sebelum ditebang dinilai lebih murah daripada di Malaysia. Selain itu, AS juga menuduh larangan ekspor kayu gelondongan sebagai salah satu bentuk subsidi.

Namun akhirnya Pemerintah Indonesia bersama exportir Indonesia yakni PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (Tjiwi Kimia) dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (Pindo Deli), yang berada di bawah bendera Sinar Mas Pulp and Paper Products, mengajukan perlawanan atas tuduhan industri lokal AS tersebut dalam investigasi terkait yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan (US DOC) dan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (ITC). Baru pada Pada Selasa 20 November 2007 waktu setempat, dalam voting 5 - 1, anggota ITC menyatakan bahwa impor kertas berlapis dari Indonesia (juga Cina dan Korea) tidak menyebabkan kerugian kepada penghasil kertas berlapis di AS dan dengan demikian menghentikan investigasi atas tuduhan industri lokal tersebut (http://m.inilah.com/read/detail/2847/as-cabut-tuduhan-dumping-kertas-berlapis-indonesia/).

4.3 Dampak Krisis Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2008 Terhadap Industri Manufaktur Indonesia

Seperti sudah dinyatakan di mula, bahwa dampak krisis ekonomi Amerika Serikat tidak berlaku agregatif terhadap Indonesia, melainkan segmentatif. Artinya tidak secara keseluruhan menghantam perekonomian Indonesia. Fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Hanya di sektor tertentu yang terkena dampak, terutama yang berorientasi ekspor. Misalnya sektor industri manufaktur. Tetapi secara umum, seperti pula yang dijelaskan sebelumnya, ada dua jalur dampak krisis ekonomi AS terhadap negara-negara di dunia, khususnya Indonesia, yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Dari penglihatan terhadap jalur dampak krisis dalam sub bab sebelumnya, terlihat bahwa dari jalur mana industri manufaktur Indonesia terkena dampak krisis ekonomi Amerika Serikat.

Dampak krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap ekonomi suatu negara, dalam hal ini Inddustri manufaktur, berhubungan erat dengan derajat integrasi dari negara bersangkutan. Kecepatan dan efektivitas dari langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan menanggulangi krisis dari pemerintah di negara bersangkutan juga memainkan peran penting (Tambunan, 2011 : 77).

Krisis ekonomi Amerika Serikat yang berdampak pada industri manufaktur Indonesia melewati jalan kedua. Perusahaan besar Indonesia tidak terkait secara langsng dengan *Subprime Mortgage*, dan industri-industri manufaktur Indonesia (dalam hal ini perusahaan) tidak terkait secara langsung dengan dengannya. Tegasnya, perusahaan industri manufaktur Indonesia tidak bermain dalam pasar kredit tersebut.

Dalam ikhwal perdagangan internasional, khususnya ekspor, krisis ekonomi Amerika Serikat menyebabkan penurunan pemintaan dunia terutama terhadap produk-produk manufaktur dari negara sedang berkembang (NSB), termasuk di kawasan Asia. Publikasi dari *The Asian Developmen Outlook 2009 Update* dari *Asian Development Bank* (ADB) menunjukan bahwa negara-negara yang masuk dalam *newly industrialized countries* (NICs), yakni negara-negara industri baru seperti Hongkong, China, Korea Selatan, Taipe, dan Singapura, adalah negara-negara yang termasuk di antara banyak negara di Asia yang paling menderita dari jatuhnya permintaan ekspor dan oleh karena itu mengalami kontraksi serius di dalam kegiatan-kegiatan produksi domestik mereka. Laju pertumbuhan negatif dari impor barang dan jasa dengan cepat mengimbangi laju penurunan ekspor karena rantai-rantai suplai bereaksi terhadap penurunan permintaan di negara-negara industri maju utama, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di zona Eropa (Tambunan, 2011 : 86).

Pertumbuhan ekspor khususnya barang-barang manufaktur di beberapa negara anggota ASEAN juga menderita dari berkurangnya permintaan dunia yang mengalami kontraksi bahkan sejak Oktober 2008, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura, dengan masing-masing, -2,6%, -14,4% dan -3,3%. Pada bulan januari 2008, eskpor manufaktur Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 35% dibandingkan bulan yang sama setahun sebelumnya (2007), namun pada bulan yang sama di tahun 2009, angka pertumbuhannya negatif (Tambunan, 2011 : 87).

Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tentang volume ekspor-impor Indonesia pada November 2008 mengalami penurunan

sebesar 11% dengan nilai US$ 9,61 miliar, dari nilai total US$128,09 milliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya permintaan produk dari negara-negara tujuan ekspor.

Ekonomi global yang lesu menjadi salah satu penyebab dari menurunnya nilai ekspor Indonesia tersebut. Penurunan nilai ekspor Indonesia juga terjadi pada tahun 2009 dari US$ 137,miliar menjadi US$ 116 miliar. Namun pada tahun 2010, nilai ekspor Indonesia meningkat secara signifikan sebesar 35.42 persen menjadi US$ 157 miliar. Kenaikan tersebut terjadi karena terjadi diversifikasi pasar, atau perluasan pasar (ekspansi pasar) ekspor Indonesia ke negara-negara Asia dan Amerika latin. Berikut akan dilihat tabel ekspor barang-barang manufaktur di sejumlah negara-negara ASEAN.

Tabel 4.8
Pertumbuhan Ekspor dari Barang-barang Manufaktur Negara ASEAN
Tahun 2008 - 2009

Periode	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
2008						
April	22,5	20,9	4,9	16,4	16,6	29,1
Mei	31,6	22,9	2,4	12,5	12,5	32,1
Juni	34,1	18,6	9,2	10,9	20,6	34,1
Juli	24,8	25,3	4,4	15,2	39,7	47,1
Agustus	29,9	10,7	6,6	7,7	5,2	36,8
September	29,0	15,0	1,3	11,4	18,2	8,6
Oktober	4,7	-2,6	-14,4	-4,3	2,4	20,1
November	-1,8	-4,9	-11,4	-11,9	-20,1	-6,3
Desember	-18,7	-14,9	-40,3	20,4	-11,5	4,3
2009						

Januari	-35,0	-27,8	-40,6	-37,8	-24,6	-25,5
Februari	-32,3	-16,0	-39,0	-23,7	-6,6	-32,3
Maret	-27,9	-15,6	-30,8	-20,7	16,6	13,0
April	-22,6	-26,3	28,6	26,0	16,1	16,1

Sumber: Tambunan, 2009 : 88

Beberapa industri manufaktur yang berorientasi ekspor seperti tekstil, barang-barang kulit, alas kaki, rotan, kertas, dan lainnya sangat berkaitan erat dengan rantai nilai regional dan global lewat sistem-sistem produksi dan perdagangan di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Sebab itulah industri-industri tersebut rentan terhadap setiap goncangan ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2008-2009. Industri-industri tersebut mengalami penurunan permintaan dunia. Industri-idnustri itu pula sangat didominasi oleh UMKM yang padat karya. Konsekuensi dari penurunan permintaan tersebut berdampak serius pada kesempatan kerja dan angka pengangguran (Tambunan, 2009 : 89).

Keterkaitan ini juga menyangkut nilai tukar mata uang. Atau kurs valuta asing. Yang menarik, meski Amerika Serikat dilanda krisis, nilai tukar mata uang dollar AS tidak anjlok terhadap mata uang negara ASEAN lainnya. Ini terjadi karena kebutuhan untuk menyimpan dollar sangat besar—apalagi sebagai alat pembayaran internasional—dalam menyelamtkan aset-aset berharganya.

Sejatinya, dampak krisis Ekonomi Amerika Serikat baru terasa makin berat oleh Indonesia adalah pada tahun 2009. Karena krisisnya sendiri mulai pecah pada akhir tahun 2008. Artinya bahwa, meski tahun 2008 adalah tahun permulaan krisis, dampaknya terasa kepada sektor riil di Indonesia baru terjadi

pada tahun 2009. Ini ditunjukan dengan data-data ekspor Indonesia terhadap dunia maupun Amerika yang mengalami penurunan dengan tingkat variasi yang berbeda. Berikut akan dilihat data ekspor Indonesia pada tahun krisis terhadap Amerika.

Tabel 4.9
Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 2009 - 2010

Industri	Tahun	
	2009	2010
Tekstil	3.479.913.719	4.141.370.452
Alas kaki	401.546.568	564.083.467
Kertas	128.311.902	99.986.548

Sumber: Pusdatin Kementerian Perdagangan, 2012

Data dari tabel ini jika dibandingkan dengan data di tabel 4.6, menunjukan bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dalam tiga subsektor tersebut cenderung menurun pada tahun 2009 dan 2010. Namun hal agak lain terjadi pada industri alas kaki yang ekspornya tetap tumbuh pada masa-masa krisis. Pertumbuhan ini tidak berarti tidak ada masalah, sebab ternyata pada tahun yang sama, ekspor industri alas kaki Indonesia ke negara-negara eropa mengalami penurunan. Seperti Belanda, Inggris, Italia, Jepang, dan Rusia.

Dari data-data yang ada, krisis ekonomi Amerika Serikat mengakibatkan konsumsi TPT dunia pada 2009 turun 5% dibandingkan dengan 2008. Konsumsi TPT dunia yang menurut perkiraan semestinya tumbuh menjadi 68,3 kg/kapita pada 2009 ternyata hanya mencapai 66,6 kg/kapita. Di tingkat nasional, dampak

yang dialami industri ini dapat dilihat dari penurunan produksi yang telah mencapai 10%. Menurut laporan API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), potensi PHK yang diakibatkan mencapai 100 ribu pekerja, dari sekitar 1,2 juta tenaga kerja di industri TPT yang menyerap sekitar 12,7% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur. Sebagian besar industri ini letaknya tersebar di hampir semua provinsi di Jawa (Smeru Research Institute, 2009 : 2).

Jawa Barat yang merupakan sentra industri TPT di Indonesia menampung lebih dari 700 pabrik dan menyerap sekitar 700.000 tenaga kerja. Di wilayah ini, industri TPT yang paling terkena dampak krisis. Krisis Ekonomi tersebut menyebabkan pembengkakan biaya produksi hingga 25%, menyusul kenaikan harga bahan baku impor akibat lonjakan kurs dolar terhadap rupiah. Lebih dari 40 industri TPT di daerah ini merumahkan lima belas ribu pekerja dan sekitar 100 ribu lainnya terancam kehilangan pekerjaan. Selain itu, lonjakan harga bahan baku impor yang membuat biaya produksi naik sekitar 20%, mengakibatkan 50 ribu pengrajin tekstil dari sekitar 150 industri kecil dan menengah juga terancam bangkrut (Smeru Research Institute, 2009 : 2).

Keputusan merumahkan karyawan merupakan salah satu upaya efisiensi dalam rangka membendung dampak krisis. Di Kawasan Berikat Industri (KBI) Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, terdapat 12 perusahaan TPT dan garmen yang meliburkan buruh kontraknya. Peliburan karyawan ini sudah berlangsung sejak Oktober 2008. KBI mempekerjakan sekitar 18 ribu buruh tetap dan 4.900 buruh kontrak; sebanyak 1.810 buruh tetap di-PHK, 855 dirumahkan, dan semua karyawan kontrak tidak diperpanjang kontraknya. Meski proporsi produk yang

diekspor ke Amerika Serikat (AS) hanya 4%, nilainya yang besar berdampak serius terhadap industri ini. Di Purwakarta, beberapa perusahaan yang umumnya mengekspor produk ke AS merugi akibat pembatalan pesanan senilai US$2 juta. Akibatnya, 6.536 pekerja diberhentikan. Beberapa industri TPT di Solo, Semarang, dan Kendal mem-PHK ratusan karyawan menyusul pembatalan pesanan dari luar negeri. Industri TPT di Boyolali mem-PHK 848 buruh dengan alasan negara tujuan ekspor menghadapi kesulitan ekonomi, seperti akibat devaluasi mata uang di Korea Selatan dan Turki, atau masalah ekonomi lainnya di Eropa Barat dan AS (Smeru Institute, 2009 : 3).

Industri Alas kaki pada Januari-Februari 2009, terdapat 5 ribu pekerja Pada periode November-Desember 2008 tercatat 9 ribu pekerja di-PHK. Total pada November 2009 sampai Februari 2010, tercatat 14 ribu pekerja yang di-PHK. Pesebaran industri alas kaki adalah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Seperti yang terlihat di tabel 4.8, bahwa dalam masa krisis, ekspor alas kaki ke AS masih baik. Menurut Ketua Aprisindo, gambaran ini menunjukan felksibilitas dari sektor alas kaki. Artinya dalam hal ini, bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan adalah antisipasi progresif yang dijalankan oleh pelaku usaha di subsektor ini. Industri *pulp* dan kertas mengalami hal yang sama. Salah satu perusahaan Kertas di Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper mem-PHK 500 karyawan, 1000 lainnya dirumahkan. Keadaan ini mendorong buruh pabrik tersebut berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat mengambil langkah konkret untuk mencegah perusahaan memecat karyawan. Mereka juga meminta pemerintah

menyelamatkan perushaan-perusahaan tempat mereka bekerja (http://www.depnakertrans.go.id/microsite/krisiscenter/uploads/doc/september.pdf). Berikut akan dilihat dalam tabel angka pemutusan hubungan kerja yang terjadi selama kurun waktu 2009.

Tabel 4.10
Angka PHK dan Dirumahkan (perjiwa) Industri Manufaktur Tahun 2009
Per-Daerah Basis Industri

Provinsi	Jumlah PHK	Dirumahkan	Alasan
Banten	17.957	4217	Krisis Ekonomi
Jakarta	18.009	---	Krisis Ekonomi/Perusahaan Tutup
Jawa Barat	3.267	800	Krisis Ekonomi
Jawa Tengah	10.150	9.269	Produksi Menurun / Pasaran Turun, Perusahaan Tutup / Tidak Ada Order, Efisiensi, dll
Jawa Timur	1874	125	Perusahaan Tutup

Sumber : Krisis Center - Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2009

Dampak krisis atas penurunan ekspor, kenaikan harga produksi, dan pemutusan hubungan kerja ini bukan hanya terkait dengan Amerika Serikat, tetapi juga berkaitan dengan pasar-pasar negara lain yang mengalami kelesuan akibat imbas krisis. Kelesuan tersebut membuat permintaan produk industri manufaktur Indonesia secara keseluruhan menurun. Ini juga terkait dengan tingginya ongkos produksi dan mahalnya kebutuhan bahan baku impor bagi sebagai keperluan industri manufaktur tersebut.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa angka PHK dan angka perumahan cukup banyak angkanya terutama didaerah yang benar-benar menjadi basis industri.

Seperti di Banten dan Jawa Tengah. Alasan yang tercantum di sana umumnya berkaitan dengan krisis ekonomi yang mengakibatkan turunnya permintaan, produksi menurun, dan akhirnya perusahaan melakukan efiensi guna menghindarinya dari kebangkrutan.

Satu hal yang menjadi kekhawatiran pelaku usaha di tiga subsektor industri ini adalah impor murah produk-produk serupa dari Cina. Seperti yang sudah diketahui bahwa produk-produk Cina dapat diimpor dengan mudah ke Indonesia dengan harga yang jauh di bawah produk Indonesia. Apa yang terlihat dalam kasus ini, sejatinya masih dalam lingkup industri profesional. Industri rumahan yang ada dalam tiga sektor ini juga cukup banyak dengan pesebaran yang hampir sama dengan industri profesional.

4.4 Upaya Pelaku Usaha dan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2008

Upaya internal perusahaan untuk mengatasi dampak krisis umumnya dilakukan dalam bentuk peningkatan atau perluasan pasar dalam dan luar negeri. Perusahaan yang berorientasi ekspor mulai mencari peluang pasar baru di luar AS, Jepang, dan Eropa Barat. Beberapa alternatif pasar yang masih terbuka adalah Timur Tengah dan Eropa Timur. Misalnya, di Timur Tengah, Dubai yang tengah membangun megaproyek berupa kawasan kota baru merupakan pasar yang sangat potensial bagi berbagai produk Indonesia. Begitu juga dengan Eropa Timur yang tidak terpengaruh krisis karena dasar perbankan mereka berbeda dengan dasar

perbankan Eropa Barat dan AS. Perluasan atau diversifikasi pasar ini penting untuk mencari celah baru bagi kelangsungan industri itu sendiri.

Pemerintah menetapkan tiga fokus utama arah kebijakan terhadap industri manufaktur dalam mengantisipasi krisis.

Pertama, upaya peningkatan daya tahan dan daya saing industri. Upaya tersebut dicapai melalui perbaikan iklim usaha dalam rangka ketahanan dan pembangunan industri baru maupun perluasan usahanya di seluruh rantai pertambahan nilai; peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan; pengembangan penggunaan energi alternatif yang berbasis bahan baku nabati melalui optimalisasi 20 pabrik; program restrukturisasi permesinan industri (industri TPT, alas kaki dan industri kertas, gula); penyediaan layanan teknis dan manajemen dalam rangka akses teknologi produk maupun proses produksi; serta pemberian fasilitas penguatan pasar internasional dan produk-produk industri untuk mendorong pengembangan industri berorientasi ekspor.

Kedua, upaya peningkatan kapasitas industri melalui peningkatan investasi industri; peningkatan penggunaan produksi dalam negeri melalui promosi dan dukungan fasilitas; mengembangkan pilot proyek pengembangan industri; pemberdayaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri di daerah; mengembangkan industri berbasis agro di daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditi primer; serta membina dan memanfaatkan teknologi industri melalui pengembangan produk substitusi pangan.

Ketiga, upaya peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri, seperti pengembangan teknologi baru yang siap diterapkan pada industri;

perluasan penerapan standardisasi, akreditasi dan pengendalian; peningkatan standardisasi melalui penyusunan rancangan SNI; pembangunan kawasan industri khusus, bekerjasama dengan pemerintah daerah; serta pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian. *Keempat,* pengetatan impor dan penggalangan kebijakan beli produk dalam negeri (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2009 : 20).

Pada konteks yang lain, kendala-kendala umum yang mempengaruhi momentum perbaikan tersebut, misalnya:

1. Industri-industri yang padat karya sangat tergantung pada impor bahan baku, input perantara, dan komponen, mulai dari 40%-43% di industri-industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit serta 56% di industry-industri alas kaki. Ketergantungan ini disebabkan oleh tidak adanya suplai domestik dan industri-industri pendukung dan lemahnya keterkaitan produksi antarindustri di dalam Negara.
2. Sangat besarnya penanaman modal asing (PMA) di sektor industri manufaktur nasional (walaupun memberikan keuntungan-keuntungan tertentu, seperti pengetahuan mengenai proses manufaktur) telah membuat sektor tersebut manjadi sangat tergantung pada suplai bahan baku dan komponen dari luar negeri.
3. Walaupun pertumbuhan PMA di sektor industri manufaktur sangat pesat dan Indonesia sudah masuk kedalam sistem manufaktur regional, peralihan teknologi ke Indonesia dalam arti yang luas, termasuk

teknikal, manajemen, organisasi, pemasaran, pengembangan produk, dan keterkaitan eksternal sangat terbatas.

4. Ketergantungan pada PMA juga telah membuat proses peningkatan kemampuan perusahaan-perusahaan local dalam proses manufaktur dan kemampuan untuk mengembangkan produk dengan merek sendiri serta membangun jaringan pemasaran sendiri berjalan lambat (http://www.datacon.co.id/ 2012Industri.html).

Dalam meredam dampak dari krisis keuangan, memang sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kembali pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang membaik dapat diperlihatkan dari semakin meningkatnya volume perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, membaiknya sektor perbankan dalam menyalurkan dananya ke sektor yang fundamental dan juga meningkatnya investasi ke sektor-sektor yang penting, seperti industri. Untuk menumbuhkan kembali pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengambil langkah antara lain:

1. Pengembangan UMKM

   UMKM merupakan suatu tonggak penggerak perekonomian Indonesia. Hampir 99,9 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM bahkan menyumbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi 2-4% per tahun bagi Indonesia. Besarnya potensi unit usaha UMKM yang mencapai 48,9 juta UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia. Pengembangan UMKM penting, sebab diluar perusahaan

perusahaan besar, UMKM-UMKM yang berbasis industri manufaktur banyak menyerap tenaga kerja.

2. Kebijakan Fiskal

   Kebijakan ini bersumber pada pengalokasiaan APBN untuk dapat maksimal dalam penggunaannya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan akibat krisis keuangan global. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah adalah stimulus fiskal 2009. Paket stimulus fiskal ini adalah upaya pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan yang semakin serius sehingga dapat diredam yang pada akhirnya menghindarkan Indonesia kelembah resesi yang lebih parah. Di negara-negara lain pun menerapkan stimulus fiskal dengan penerapan kebijakan yang berbeda-beda, namun bertujuan yang sama yaitu, meredam krisis keuangan dan meningkatkan kembali kepercayaan pasar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Penguatan ekspor barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga daya saing produk dalam negeri. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain *trade financing* dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Selain itu untuk menjaga pertumbuhan ekspor perlu dilakukan upaya peningkatan ekspor ke pasar ekspor non-tradisional (selain AS, EU, Jepang, dan Singapura) sehingga tingkat ketergantungan kepada pasar AS, EU, Jepang, dan Singnapura dapat berkurang.

4. Pengamanan pasar dalam negeri dan penggunaan produk dalam negeri. Pengamanan pasar dalam negeri dilakukan untuk mencegah serbuan barang-barang impor illegal, *dumping*, dan pengalihan barang impor dari negara lain akibat berkurangnya permintaan pasar internasional. Sedangkan untuk memperkuat permintaan terhadap produk dalam negeri dilakukan promosi produk dalam negeri (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2009 : 24).

4.5 Analisa Dampak Krisis Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2008 Terhadap Industri Manufaktur indonesia

Dari pembahasan hasil yang telah dipaparkan, terlihat bahwa industri manufaktur Indonesia terkena dampak krisis ekonomi Amerika Serikat dengan intensitas yang kurang lebih hampir sama. Ketiga sektor industri manufaktur yang diteliti, Tekstil, Alas Kaki, dan Kertas, terkena dampak misalnya dalam penurunan angka volume ekspor dan pertumbuhan ekspor, serta pemutusan hubungan kerja para karyawannya. Juga sebagian karyawan yang dirumahkan dengan alasan efiensi akibat penurunan permintaan, pembatalan kontrak, serta bangkrutnya perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena jika ditarik ke konteks yang lebih besar, bahwa ekonomi Indonesia saling terkait dengan ekonomi global. Dimana ekonomi global merupakan satu jalinan sistem yang mempengaruhi satu sama lain.

Jalur-jalur transmisi krisis yang melanda Indonesia lebih diakibatkan oleh, sebagaimana yang sudah dijelaskan, lewat dampak tidak langsung. Yaitu bahwa

lebih karena keterkaitan Indonesia dengan pasar global, bukan sumbu krisis (sektor perumahan). Perusahaan, investor, maupun pelaku-pelaku usaha di Indonesia tidak bermain langsung dengan saham-saham dan obligasi perumahaan Amerika Serikat dan segala macam derivasinya. Tentu akan berdampak hebat terhadap Indonesia jika pelaku-pelaku usaha dalam negeri berhubungan langsung dengan investasi perumahan di Amerika Serikat, sebagaimana yang dialami oleh pelaku usaha besar di negara-negara eropa.

Perlu ditekankan bahwa dampak krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 terhadap Indonesia tidak berlaku general (umum), tetapi segmentatif. Krisis ekonomi Amerika Serikat tidak berdampak menyeluruh terhadap Indonesia seperti krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini dikarenakan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dan terjaga. Jika ditarik ke tahun krisis Asia 1997/1998, terlihat jelas bahwa kemenyeluruhan dampak tersebut berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat, nilai tukar rupiah yang anjlok, ekonomi melemah dengan gulung tikarnya perusahaan-perusahaan besar, larinya investor, meningkatnya hutang luar negeri akibat peminjaman untuk menggerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Konteks segmentatif itu berkaitan dengan perekonomian global yang menjadi arena interaksi pelaku-pelaku usaha. Misalnya pelaku-pelaku usaha yang berorientasi ekspor: pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur.

Krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 tidak sampai meruntuhkan ekonomi nasional, hanya menghantam sebagaian sektor ekonomi yang tentu saja mempunyai daya serap tenaga kerja yang banyak. Meski begitu, pemutusan

hubungan kerja terhadap karyawan tentu menyumbang angka pengangguran nasional per periode krisis. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan dan mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan sektor industri manufaktur dengan program revitalisasi, penaikan standar mutu, dan lain sebagainya. Kepastian langkah pemerintah ini juga menyangkut kenyaman investor luar negeri yang menanamkan modalnya pada industri manufaktur Indonesia.

Yang luput dari studi ini adalah Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang berbasis manufaktur. Banyak sekali pelaku UMKM di Indonesia, terutama di pulau Jawa yang eksis dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Meski berbasis UMKM, tak sedikit yang mengekspor hasil produksinya ke luar negeri. Pelaku UMKM tentu terkena dampak, tetapi karena kurang rinci dan formal sebagaimana pelaku-pelaku usaha besar manufaktur (perusahaan), sulit untuk mendata dan mengetahui berapa besar akibat krisis ekonomi Amerika Serikat. Karena ciri yang kurang rinci dan formal ini, maka sedikit sulit untuk pemerintah mengimplementasikan kebijakannnya. Maka menjadi tantangan pemerintah, sebagaimana dalam salah satunya dalam butir upaya menghadapi krisis, untuk melindungi pelaku UMKM.